

PENGELOLAAN SAMPAH TPA KOPI LUHUR: RESPONS ADMINISTRASI PUBLIK LOKAL

Rusnato¹, Siti Adha Aulawiyah², Harisul Ilmi³, Aisyah Nurul 'Azizah⁴
rusnato.123090113@ugj.ac.id¹, siti.123090095@ugj.ac.id², harisul.123090106@ugj.ac.id³,
aisyah.123090091@ugj.ac.id⁴

Universitas Swadaya Gunung Jati

ABSTRAK

TPA Kopi Luhur Kota Cirebon berada dalam kondisi krisis akibat kelebihan kapasitas dan sistem pengelolaan sampah yang belum berkelanjutan. Volume sampah harian mencapai 200–300 ton, sementara pengelolaan masih didominasi pola angkut–buang yang menimbulkan risiko pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar. Krisis ini mencerminkan lemahnya respons administrasi publik lokal, ditandai oleh rendahnya pemilahan sampah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan fokus anggaran pada operasional dibandingkan pencegahan. Policy brief ini mendorong transformasi tata kelola pengelolaan sampah melalui pendekatan preventif, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi multipihak guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: TPA Kopi Luhur, Pengelolaan Sampah, Tata Kelola Lingkungan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus (Natalia et al., 2020).

Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang RT/RW yang ada di Kota Cirebon tahun 2011 sampai 2031 disebutkan bahwa TPA Sampah Kopi Luhur diperuntukkan sebagai TPA dengan sistem sanitary landfill. Tetapi, berdasarkan pengukuran dan pengamatan langsung di lapangan tidak memungkinkan diterapkan sistem sanitary landfill. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan sistem baru terutama sanitary landfill membutuhkan investasi yang sangat besar. Selain itu cara pengurugan sampah di TPA Kopi Luhur belum sesuai, fasilitas perlindungan yang belum memadai di TPA, kurangnya dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup sehingga dalam memperbaiki permasalahan lingkungan perlu diterapkan cara pengurugan baru dari open dumping menjadi controlled landfill secara berkala (Isni et al., 2019).

Sampah bisa juga diartikan sebagai sisa, baik bahan yang sudah tidak digunakan lagi (barang bekas) maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya yang dari segi ekonomis, sampah adalah bahan buangan yang tidak ada harganya dan dari segi lingkungan, sampah adalah bahan buangan yang tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan penggunaan dan gangguan pada kelestarian lingkungan (Sumarab et al., 2022).

Menurut (Soma, 2010) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. TPA tidak hanya menjadi tempat pembuangan terakhir bagi sampah tetapi juga menjadi tempat terakhir sampah diproses untuk selanjutnya dikembalikan ke alam. Hal ini tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia masih banyak TPA yang menjadi tempat untuk sekedar membuang sampah secara terbuka (open dumping).

TPA Kopi Luhur Kota Cirebon berada dalam kondisi kritis akibat meningkatnya volume timbunan sampah yang telah melampaui daya tampung lahan. Sejak 2024, TPA ini menerima sekitar 200–300 ton sampah per hari, sementara sistem pengelolaan yang diterapkan masih didominasi pola angkut–buang dan belum didukung teknologi pengolahan yang memadai. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai risiko lingkungan, seperti pencemaran air tanah, emisi gas metan, serta potensi longsor dan kebakaran sampah.

Permasalahan TPA Kopi Luhur tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya respons administrasi publik lokal. Implementasi regulasi pengelolaan sampah belum berjalan efektif, pemilahan sampah dari sumber masih rendah, dan alokasi anggaran lebih banyak difokuskan pada biaya operasional dibandingkan upaya pencegahan. Akibatnya, beban pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan lebih banyak ditanggung oleh masyarakat sekitar TPA.

Kondisi ini menunjukkan perlunya perubahan paradigma kebijakan menuju tata kelola pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pendekatan yang lebih preventif, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi menjadi penting agar pengelolaan TPA Kopi Luhur tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keadilan ekologis di tingkat lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekologi administrasi adalah studi tentang interaksi antara administrasi publik dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik, sosial, ekonomi, maupun politik. Ekologi administrasi menganalisis bagaimana faktor-faktor lingkungan memengaruhi struktur, fungsi, dan perilaku organisasi pemerintah, dan bagaimana administrasi publik dapat berkontribusi dalam mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Secara ekologis, TPA Kopi Luhur telah melampaui daya dukung lingkungannya. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dalam menjaga kebersihan dilingkungan masyarakat dapat dilihat dari cara mereka membuang sampah apakah masyarakat membuang sampah pada tempatnya, dipinggir-pinggir sungai, atau bahkan dipinggir jalan raya adanya petugas kebersihan hanyalah sebagai pembantu dalam menjaga kebersihan, sedangkan faktor utama yang sangat berpengaruh agar lingkungan masyarakat terlihat bersih adalah kesadaran masyarakat itu sendiri (Maria et al., 2023). Lokasi TPA di wilayah perbukitan, tanpa sistem pengelolaan lindi dan gas yang memadai, meningkatkan risiko pencemaran air tanah, emisi gas metan, serta potensi longsor dan kebakaran sampah. Kondisi ini menunjukkan degradasi lingkungan yang bersifat sistemik, bukan insidental. Beban dampak ekologis TPA Kopi Luhur ditanggung secara tidak proporsional oleh masyarakat sekitar, yang menghadapi penurunan kualitas lingkungan dan risiko kesehatan lebih tinggi. Ketimpangan ini mencerminkan persoalan keadilan ekologis yang berkaitan langsung dengan lemahnya tata kelola pengelolaan sampah. Minimnya pendekatan preventif, keterbatasan pemanfaatan teknologi, dan rendahnya integrasi data lingkungan memperkuat ketidakseimbangan antara sistem administrasi publik, kondisi alam, dan struktur sosial. Oleh karena itu, krisis ekologis TPA Kopi Luhur menuntut respons kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Opsi Kebijakan

Opsi 1: Penguatan Operasional (Status Quo Plus)

Perbaikan terbatas pada pengangkutan dan penataan TPA untuk mengendalikan kondisi darurat. Mudah diterapkan, tetapi tidak menyelesaikan masalah overcapacity dan risiko ekologis jangka panjang.

Opsi 2: Pengendalian Dampak Lingkungan

Fokus pada pengelolaan leachate, gas metan, dan controlled landfill guna menekan

pencemaran. Efektif jangka pendek, namun belum mengurangi volume sampah secara signifikan.

Opsi 3: Transformasi Pengelolaan Berkelanjutan

Penerapan teknologi pengolahan sampah, penguatan regulasi pemilahan, dan pemantauan digital. Membutuhkan investasi awal, tetapi paling efektif menurunkan dampak lingkungan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Rekomendasi Utama

Pemerintah Kota Cirebon perlu segera melakukan transformasi pengelolaan TPA Kopi Luhur dari pendekatan reaktif menuju tata kelola berkelanjutan. Prioritas kebijakan diarahkan pada penerapan teknologi pengolahan sampah untuk menekan volume residu, penguatan regulasi pemilahan sampah dari sumber disertai insentif dan sanksi yang tegas, serta pembangunan sistem pemantauan digital yang terintegrasi dari TPS hingga TPA.

Selain itu, pengelolaan TPA harus didukung melalui kemitraan multipihak, khususnya dengan sektor swasta, untuk pemanfaatan gas metan dan pengembangan ekonomi sirkular. Seluruh kebijakan tersebut perlu dilaksanakan secara bertahap dan terukur dengan indikator kinerja yang jelas agar mampu mengurangi risiko ekologis, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menjamin keadilan lingkungan bagi masyarakat sekitar TPA.

KESIMPULAN

Infografis ini disusun untuk memberikan gambaran cepat dan komprehensif mengenai krisis pengelolaan sampah di TPA Kopi Luhur Kota Cirebon. Visualisasi data digunakan sebagai alat bantu analisis kebijakan untuk menyoroti kondisi eksisting, dampak ekologis dan sosial, serta arah kebijakan yang diperlukan. Melalui penyajian informasi yang ringkas dan mudah dipahami, infografis ini diharapkan dapat membantu pengambil keputusan dan pemangku kepentingan dalam memahami urgensi permasalahan serta kebutuhan akan transformasi tata kelola pengelolaan sampah di tingkat lokal.



Keterangan Gambar: Infografis ini menggambarkan kondisi kritis TPA Kopi Luhur yang mengalami kelebihan kapasitas dengan timbunan sampah 200–300 ton per hari, sistem pengelolaan yang masih didominasi pola angkut–buang, serta rendahnya pemilahan sampah dari sumber. Dampak ekologis dan sosial yang muncul mencerminkan lemahnya respons tata kelola pengelolaan sampah. Perbandingan opsi kebijakan menunjukkan bahwa transformasi menuju pengelolaan berkelanjutan berbasis teknologi, regulasi pemilahan, dan pendekatan preventif merupakan arah kebijakan paling efektif untuk menurunkan risiko lingkungan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Isni, N. N., Sungkowo, A., Widiarti, W., & Cirebon, K. (2019).
- Maria, A., Zakarias, J., & Lumintang, J. (2023). Kondisi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) dalam Lingkungan Sosial Ekonomi dan Kesehatan. *Ilmiah Society*, 3(2), 1–8.
- Natalia, L., Lisafitri, Y., Cahya Alam, F., Studi Teknik Lingkungan, P., Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan, J., Teknologi Sumatera Jalan Terusan Ryacudu, I., Hui, W., Agung, J., & Selatan, L. (2020).
- Soma, S. (2010). Pengantar Ilmu Teknik Lingkungan. *Pelita I*, 142. <https://ipbpress.com/product/196-pengantar-ilmu-teknik-lingkungan-seri-pengolahan-sampah-perkotaan>
- Sumarab, J. S., Mangangka, I. R., & Supit, C. J. (2022). Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Di Kecamatan Amurang Raya. *Tekno*, 20(81), 217–231. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/tekno/article/view/42559/37553>. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Jakstranas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga*. Jakarta: KLHK.
- Sutrisno, E. (2014). *Manajemen lingkungan dan pembangunan berkelanjutan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dwiyanto, A. (2017). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Raharjo, T., & Nugroho, R. (2018). Kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 89–104.